

LAYANAN HUKUM

Pendaftaran Badan Hukum (CV)

- Asli dan Fotocopy (CV)
- Fotocopy NPWP atas nama Akta (CV) yang bersangkutan
- Fotocopy KTP Direktur
- Biaya PNBP : Rp. 10.000,-

Pendaftaran Perubahan Badan Hukum (CV)

- Fotocopy akta CV yang terdahulu
- Asli dan Fotocopy Akta (CV) yang diperbarui
- Fotocopy NPWP atas nama Akta (CV) yang bersangkutan
- Fotocopy KTP Direktur
- Biaya PNBP : Rp. 10.000,-

KEPANITERAAN

HUKUM


Pengadilan Negeri Tebo Kelas II
Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo Km.12,
Muara Tebo Jambi 37571
Telp. (0744) 21741, 21775 Fax. (0744) 21741, 21775
pencadilanneqeritebo@yahoo.co.id



Elektronik Surat Keterangan

<https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id/>

Layanan Surat Keterangan Online

1. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit;
2. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana;
3. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya;
4. Surat Keterangan di Pidana Karena Kealpaan Ringan atau Alasan Politik;
5. Surat Keterangan Tidak memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara;

PERSYARATAN

1. Alamat e-mail pengguna aktif
2. Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku
3. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Soft Copy Pas Foto 4x6

Pengajuan permohonan dapat dilakukan melalui PC atau Smartphone yang terkoneksi internet

ERA BARU SURAT KETERANGAN

1

LAYANAN

Jangkauan Layanan yang Lebih Luas

2

KECEPATAN

Kecepatan dalam pelayanan publik dengan bantuan Teknologi Informasi yang tepat

3

VALIDITAS

Validasi terhadap pihak –pihak berperkara di pengadilan



Ajukan Permohonan Surat Keterangan
Anda Melalui :



<https://eraterang.badilum.mahkamahagung.go.id>



Pengadilan Negeri Tebo Kelas II

Komplek Perkantoran Kabupaten Tebo Km.12,
Muara Tebo Jambi 37571

Telp. (0744) 21741, 21775 Fax. (0744) 21741, 21775
pengadilannegeritebo@yahoo.co.id

**DASAR
HUKUM**



Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016

Tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2018

Tentang Pemberlakuan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019

Tentang Pengenaan Tarif Penerimaan Negara
Bukan Pajak Terhadap Surat Keterangan di
Luar Perkara

SK Dirjen Badilum Nomor 44/DJU/SK/HM.02.3/2/2019

Tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP+) di Lingkungan
Peradilan Umum.